

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Deddy Ismatullah, *Ilmu Negara dalam Multi Perspektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum, dan Agama*, Bandung: Pustaka setia, 2007, hlm. 67.
- Dikdik Mohamad Sodik, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011, hal. 17.
- Dirhamsyah, *Maritime Law Enforcement and Compliance in Indonesia: Problems and Recommendations, Maritime Studies*, Vol. 144, (Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2005), Pp 1-6, hlm 2.
- Eka Martiana Wulansari, *Penegakan Hukum Di Laut Dengan Sistem Single Agency Multy Tasks*, Jurnal Rechts Vinding, hlm 3.
- Elfina Sahetapy dan Sari Mandiana, *Handout Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya, 2013, hlm. 3
- Inu Kencana Syafiie, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI00*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm.2.
- Indian Navy, *Ensuring Secure Seas; Indian Maritime Security Strategy, (New Delhi; Intergrated Headquarters-Indian Ministry of Defence, 2015)*, hlm.123.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*. Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2010 hlm 57.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang, Bayumedia, 2013), hlm 57
- Kamus Umum Bahasa Indonesia, Depdikbud, Jakarta, 1994, hlm.29.
- Michael Roe, *Maritime Goverbabce and Policy-Making, (London; Springer Science & Business Media, 2012)*, hlm.46.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, 1998, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm 35-36.

- Mukti Fajar & Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Fajar, 2013), hlm 183
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti, 1988, hlm. 153.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 101.
- Nazili Abdul Azis, L. Tri Setyawanto R., Soekotjo Hardiwinoto., *Kewenangan Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) Dalam Pelaksanaan Pengamanan di Wilayah Perairan Indonesia*, *Diponegoro Law Jurnal, Volume 5*, Nomor 4, Tahun 2016.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2009. Hlm 35.
- Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm 78.
- Sadjijono, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, 2005, Yogyakarta, LB Laks Bang, hlm. 49.
- Suresh R, *Maritime Security of India; The Coastal Security Challenges and Policy Options*, (New Delhi; Vij Books India Pvt Ltd, 2014, hlm. 193
- Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Batas-batas Wilayah Negara Indonesia, Dimensi, Permasalahan, dan Strategi Penanganan (Sebuah Tinjauan Empiris dan Yuridis)*, Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2009, hal. 6.
- Soekanto Soejono, *Pengantar Penulisan Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1985), hlm 45
- Syamsumar Dar, *Politik Kelautan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010, hal. 12.

B. Perundang-undangan

Republik Indonesia (1). Undang-Undang Dasar 1945, Pembukaan alinea Keempat

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Lembaran Negara No. 294 Tahun 2014, dan Tambahan Lembaran Negara No. 5603, Pasal 61.

Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut, Lembaran Negara No. 380 Tahun 2014, Pasal 3.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Republik Indonesia, Konvensi Hukum Laut Tahun 1982 (Unclos 1982)

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Laporan Penelitian tentang Penegakan Hukum di Perairan Indonesia dan Zona Tambahan, Jakarta, 2006.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Laporan Tentang Penegakan Hukum, Ibid

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Permusyawaratan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat)*, Sekretaris Jendral MPR, Jakarta, 2010, hlm. 46.

Penjelasan atas UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kajian Pengawasan Lalu Lintas Laut di Indonesia, Jakarta; Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2014, hlm.2

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Laporan Penelitian tentang Penegakan Hukum di Perairan Indonesia dan Zona Tambahan, Jakarta, 2006, hal. 12

C. Internet dan lain-lain

diakses melalui <http://www.beacukai.go.id/arsip/stt/marine-customs.html>, pada hari selasa, tanggal 14 April 2020, pukul 23.45

Diakses melalui http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf pada hari Rabu, 8 April 2020 pada pukul 01.30

Gery Gugustomo, "Badan Keamanan Laut". Hlm 2. http://www.academia.edu/12133425/Bakamla_Single_Agent_Sektor_Keamanan_Maritim_Indonesia.

Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, [jimly.com/ makalah/ namafile/ 56/ Penegakan_Hukum.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf), diakses tanggal 23 November 2020.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Deddy Ismatullah, *Ilmu Negara dalam Multi Perspektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum, dan Agama*, Bandung: Pustaka setia, 2007, hlm. 67.
- Dikdik Mohamad Sodik, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011, hal. 17.
- Dirhamsyah, *Maritime Law Enforcement and Compliance in Indonesia: Problems and Recommendations, Maritime Studies*, Vol. 144, (Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2005), Pp 1-6, hlm 2.
- Eka Martiana Wulansari, *Penegakan Hukum Di Laut Dengan Sistem Single Agency Multy Tasks*, Jurnal Rechts Vinding, hlm 3.
- Elfina Sahetapy dan Sari Mandiana, *Handout Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya, 2013, hlm. 3
- Inu Kencana Syafiie, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI00*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm.2.
- Indian Navy, *Ensuring Secure Seas; Indian Maritime Security Strategy*, (New Delhi; Intergrated Headquarters-Indian Ministry of Defence, 2015), hlm.123.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*. Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2010 hlm 57.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang, Bayumedia, 2013), hlm 57
- Kamus Umum Bahasa Indonesia, Depdikbud, Jakarta, 1994, hlm.29.
- Michael Roe, *Maritime Goverbabce and Policy-Making*, (London; Springer Science & Business Media, 2012), hlm.46.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, 1998, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm 35-36.

- Mukti Fajar & Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Fajar, 2013), hlm 183
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti, 1988, hlm. 153.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 101.
- Nazili Abdul Azis, L. Tri Setyawanto R., Soekotjo Hardiwinoto., *Kewenangan Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) Dalam Pelaksanaan Pengamanan di Wilayah Perairan Indonesia*, *Diponegoro Law Jurnal, Volume 5*, Nomor 4, Tahun 2016.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2009. Hlm 35.
- Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm 78.
- Sadjijono, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, 2005, Yogyakarta, LB Laks Bang, hlm. 49.
- Suresh R, *Maritime Security of India; The Coastal Security Challenges and Policy Options*, (New Delhi; Vij Books India Pvt Ltd, 2014, hlm. 193
- Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Batas-batas Wilayah Negara Indonesia, Dimensi, Permasalahan, dan Strategi Penanganan (Sebuah Tinjauan Empiris dan Yuridis)*, Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2009, hal. 6.
- Soekanto Soejono, *Pengantar Penulisan Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1985), hlm 45
- Syamsumar Dar, *Politik Kelautan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010, hal. 12.

B. Perundang-undangan

Republik Indonesia (1). Undang-Undang Dasar 1945, Pembukaan alinea Keempat

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Lembaran Negara No. 294 Tahun 2014, dan Tambahan Lembaran Negara No. 5603, Pasal 61.

Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut, Lembaran Negara No. 380 Tahun 2014, Pasal 3.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Republik Indonesia, Konvensi Hukum Laut Tahun 1982 (Unclos 1982)

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Laporan Penelitian tentang Penegakan Hukum di Perairan Indonesia dan Zona Tambahan, Jakarta, 2006.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Laporan Tentang Penegakan Hukum, Ibid

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Permusyawaratan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat)*, Sekretaris Jendral MPR, Jakarta, 2010, hlm. 46.

Penjelasan atas UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kajian Pengawasan Lalu Lintas Laut di Indonesia, Jakarta; Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2014, hlm. 2

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Laporan Penelitian tentang Penegakan Hukum di Perairan Indonesia dan Zona Tambahan, Jakarta, 2006, hal. 12

C. Internet dan lain-lain

diakses melalui <http://www.beacukai.go.id/arsip/stt/marine-customs.html>, pada hari selasa, tanggal 14 April 2020, pukul 23.45

Diakses melalui http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf pada hari Rabu, 8 April 2020 pada pukul 01.30

Gery Gugustomo, "Badan Keamanan Laut". Hlm 2. http://www.academia.edu/12133425/Bakamla_Single_Agent_Sektor_Keamanan_Maritim_Indonesia.

Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, [jimly.com/ makalah/ namafile/ 56/ Penegakan_Hukum.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf), diakses tanggal 23 November 2020.

